

**Representasi Politik Uang dalam Film *Lansia Lan Sopo*
(Analisis Semiotika John Fiske)**

Daniel Gelegar Pamungkas¹, Ahmad Zamzamy²

^{1,2} Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

enggarru@gmail.com¹, ahmadzamzamy83@gmail.com²

ABSTRACT

'Lansia Lan Sopo' is a film that addresses the theme of anti-corruption with the issue of political money in the implementation of village head elections. 'Lansia Lan Sopo' is directed by Alfian Alfarisi and has a duration of 15 minutes and 09 seconds. This research aims to understand how the representation of political money in the film 'Lansia Lan Sopo' is depicted in the context of two rival campaign teams during the village head election. The research uses a qualitative descriptive approach and employs John Fiske's semiotic analysis method to dissect the codes and deeper meanings in the film. The results of the research reveal various depictions of political money in the film 'Lansia Lan Sopo.' Additionally, there is also a depiction of how political money is a product of capitalist ideology. This is demonstrated through John Fiske's semiotics with three levels: the level of reality depicting the actions of political money, the level of representation showing supporting elements in each scene, and the level of ideology to understand the concepts and meanings in the film 'Lansia Lan Sopo.'

Keywords: Political Money, John Fiske Semiotics, *Lansia Lan Sopo*

ABSTRAK

Film *Lansia Lan Sopo* merupakan sebuah film yang mengangkat tentang tema anti-korupsi dengan isu politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Film *Lansia Lan Sopo* ini disutradarai oleh Alfian Alfarisi dengan durasi 15 menit 09 detik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana representasi politik uang dalam film *Lansia Lan Sopo* yang digambarkan pada dua kubu tim sukses dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan memilih metode analisis semiotika John Fiske untuk membedah kode-kode dan arti mendalam dalam film. Dari hasil penelitian, ditemukan berbagai penggambaran tentang politik uang yang ada pada film *Lansia Lan Sopo*. Selain itu juga terdapat penggambaran tentang bagaimana politik uang menjadi buah dari ideologi kapitalisme. Hal tersebut ditunjukkan melalui semiotika John Fiske dengan tiga level, yaitu level realitas yang menggambarkan tindakan politik uang, level representasi memperlihatkan elemen pendukung dalam setiap *scene*, level ideologi untuk memahami konsep dan makna dalam film *Lansia Lan Sopo*.

Kata kunci: Politik Uang, Semiotika John Fiske, *Lansia Lan Sopo*

PENDAHULUAN

Pemilihan untuk menentukan calon pemimpin yang terjadi di Indonesia memiliki berbagai macam tujuannya. Salah satunya adalah pemilihan untuk proses

menentukan kepala desa di suatu wilayah/desa yang disebut dengan PILKADES (Pemilihan Kepala Desa). Suatu desa dapat berdiri dan diakui jika memiliki jumlah penduduk yang sesuai syarat dan memiliki pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa sebagai pemimpin dan segenap perangkat desa yang bertugas. Kepala desa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, pembangunan, dan kemasyarakatan serta kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat pemilihan. Masa jabatan kepala desa berlangsung selama enam tahun dimulai sejak pelantikan dan kepala desa yang telah menjabat, hanya boleh menduduki satu kali masa jabatan berikutnya. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa pada dasarnya harus bertanggung jawab kepada rakyat (Ramadani, 2017).

Secara umum tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa tergolong tinggi karena sebagian masyarakat tidak merasa adanya intimidasi dan tekanan politik dari pihak manapun. Selain itu adanya faktor lingkungan terdekat atau satu wilayah yang di mana mereka (masyarakat yang memilih) akan langsung merasakan bagaimana kinerja dari kepala desa yang terpilih untuk mengatur suatu desa tersebut (Ramadani, 2017). Dalam pelaksanaannya, Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) juga tidak lepas dengan isu yang selalu hangat pada setiap penyelenggaraan Pemilu yaitu isu politik uang.

Menurut Aspinall & Sukmajati (2015), politik uang adalah usaha untuk menyuap pemilih dengan memberikan uang atau layanan tertentu untuk mempengaruhi preferensi suara pemilih agar diberikan kepada pihak yang menyuap. Dalam fenomena komunikasi, politik uang tidak jauh dari *lobby* dan negosiasi. *Lobby* & Negosiasi pada dasarnya adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain dengan mendasarkan pada kekuatan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah bentuk komunikasi manusia yang khas dan transaksional yang melibatkan pengaruh timbal balik, biasanya untuk tujuan mengelola hubungan (Beebe *et al*, 2020). Kegiatan *Lobby* & Negosiasi dalam komunikasi antar pribadi berpedoman pada beberapa komponen yaitu komunikator yang melaksanakan komunikasi terhadap orang lain, pesan yang disampaikan dalam bentuk pikiran, perasaan, pengetahuan dan sebagainya, lalu ada media atau alat yang digunakan komunikator, komunikan yang merupakan tujuan dari kegiatan *me-lobby*, dan yang terakhir adalah efek atau pengaruh dari hasil kegiatan *lobby* dan negosiasi.

Namun dalam aturan yang tertulis pada undang-undang, tindakan politik uang adalah sebuah tindakan yang dilarang di dalam konstitusi dan dibahas dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 280 Huruf J yang menyebutkan bahwa:

“Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta atau masyarakat pemilu”

Selain itu juga tertulis pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 pasal 73 ayat 3 yang menjelaskan bahwa:

“Siapa pun pada waktu diselenggarakan pemilihan umum melakukan pemberian atau janji menyuap, akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun”

Dari penjelasan undang-undang di atas, ditekankan bahwa terdapat adanya larangan untuk melakukan praktik politik uang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pemilu 2019, menurut catatan Burhanuddin Muhtadi, dkk. angkanya mencapai 19,4% hingga 33,1%. Angka tersebut termasuk tinggi dalam kategori internasional. Angka tersebut juga mendudukkan Negara Republik Indonesia di *ranking money politics* ke-3 besar dunia. Lalu catatan lain menurut hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengadakan survei tentang Pemilu 2019 dan Demokrasi di Indonesia, menyatakan bahwa terdapat 47,4 persen masyarakat membenarkan adanya politik uang yang terjadi dalam Pemilu Serentak 2019, dan 46,7 persen menganggap politik uang tersebut sebagai hal yang dapat dimaklumi (<https://rumahpemilu.org/politik-uang-dan-solusinya-dalam-hukum/>).

Film yang menjadi media komunikasi massa telah banyak digunakan sebagai media penyampaian pesan moral, kritik sosial atau bahkan dalam beberapa kesempatan digunakan menjadi media propaganda. Selain itu film juga dapat menjadi media hiburan, media informasi, media edukasi, media persuasi seperti merangsang pikiran dan melibatkan perasaan dari khalayak. Nilai strategis film pun tidak hanya berperan sebagai hiburan, film berpotensi menjadi media edukasi yang dapat mengomunikasikan pesan pendidikan dan menanamkan nilai-nilai moral secara efektif, bahkan mampu memengaruhi perilaku seseorang (Trianton, 2013). Film sendiri juga bisa sebagai representasi bagaimana masyarakat dan keadaan sosial. Menjadi sebuah refleksi karena film juga berasal dari kenyataan yang dipindahkan ke dalam layar dengan menggunakan realitas sebagai bentuk representasi, film membentuk kode-kode konvensi dan ideologi dari sebuah kebudayaan (Sobur, 2003.137:128).

Politik uang merupakan tantangan yang sedang dihadapi masyarakat dalam setiap perhelatan pemilihan umum. Film merupakan media yang memiliki peluang untuk memberikan sebuah gambaran dan gagasan terhadap politik uang yang sudah menjamur bahkan diwajibkan. Kemampuan menjangkau audiens secara luas dalam waktu yang singkat adalah salah satu hal yang menarik dari film. Banyak sekali film Indonesia yang dibuat untuk tujuan merepresentasikan masalah sosial yang terjadi, salah satu contoh yaitu film pendek karya anak-anak Sidoarjo dengan judul “*Lansia Lan Sopo*”. Film ini disutradarai oleh Alfian Alfarisi, seorang sineas muda yang bertempat tinggal di Sidoarjo. Film ini dibuat setelah memenangkan *pitching* ide cerita yang diadakan oleh KPK dengan nama acara ACFF (*Anti Corruption Film Festival*) yang berskala nasional. Setelah terpilihnya ide cerita tersebut, Alfian Alfarisi mendapatkan dana sebesar 30 juta dan menghasilkan film *Lansia Lan Sopo* dengan mendapatkan nominasi *best movie* yang durasi 15 menit 9 detik (film pendek). Film

Lansia Lan Sopo (LLS) mengemas isu tentang pemilihan kepala desa yang terjadi di dalam sebuah desa. Sistem dari pilkades tersebut sudah tidak sehat atau terdapat kecurangan yang terjadi, di antaranya politik uang yang selalu ada dalam pilkades.

Penelitian ini berfokus pada representasi politik uang dalam film "*Lansia Lan Sopo*" karya Alfian Alfarisi. Dengan penggunaan teori semiotik maka penelitian dapat dilakukan secara rinci berdasarkan tanda, simbol kode, dan makna yang terkandung dalam film "*Lansia Lan Sopo*". Film ini memvisualisasikan situasi pemilihan kepala desa di suatu pedesaan yang diwarnai tindakan politik uang oleh dua kubu tim sukses setiap masing-masing calon kepala desa.

John Fiske mengemukakan teori tentang kode-kode televisi (*the codes of television*). Menurut Fiske, kode-kode yang muncul atau yang digunakan dalam acara televisi saling berhubungan sehingga terbentuk sebuah makna. Sebuah realitas tidak muncul begitu saja melalui kode-kode yang muncul, namun sebuah kode diolah dengan pengindraan sesuai referensi yang telah dimiliki oleh setiap penonton, sehingga pemahaman sebuah kode dari setiap orang akan berbeda. John Fiske membagi kode-kode tersebut menjadi 3 level yaitu level realitas, level representasi dan level ideologi. Sehingga sebuah kode akan dipersepsi secara berbeda oleh masing-masing orang yang beda juga. Pada perkembangannya, model semiotika John Fiske tak hanya digunakan dalam menganalisis acara televisi, tetapi dapat juga digunakan untuk menganalisis isi teks media yang lain seperti film, video klip, iklan, dan lain sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis representasi tindakan politik uang film '*Lansia Lan Sopo*'.

TINJAUAN PUSTAKA

Representasi

Stuart Hall dalam (Chelsy dan Suyanto, 2017) representasi didefinisikan sebagai pemakaian bahasa untuk mengungkapkan arti dari sesuatu hal. Representasi menjadi bagian terpenting dalam proses penukaran dan produksi arti dalam suatu kebudayaan yang terdiri dari beberapa anggota kelompok di dalamnya. Representasi adalah sebuah konsep tertanam di dalam pikiran kita menggunakan bahasa, dalam hal ini Stuart Hall berusaha mendefinisikan representasi dengan tegas sebagai sebuah produksi arti dengan menggunakan bahasa. Puspitasari (2013:17) juga memberikan definisi representasi sebagai cara menampilkan seseorang, kelompok, pendapat, gagasan, realitas, atau objek tertentu dalam sebuah teks.

Representasi merupakan hasil dari pembentukan sosial yang memungkinkan individu untuk menyelidiki pembentukan makna dalam teks dan mengkhususkan makna tersebut dalam beragam konteks. Representasi beroperasi dalam kaitannya dengan tanda dan makna. Oleh karena itu, sifatnya yang fleksibel dan bisa berkembang karena adanya penafsiran baru. Dengan demikian, representasi bukanlah konsep yang tetap dan mutlak, melainkan dinamis dan akan terus

berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan dan pemahaman manusia. Pandangan yang baru dan menghasilkan interpretasi yang berbeda adalah produk dari perkembangan konstruksi pemikiran manusia, dan ini adalah proses penandaan serta praktik yang memberikan makna pada suatu objek atau fenomena (Vera, 2015:150).

Film Sebagai Media Menyampaikan Kritik Sosial

Menurut (Effendi, 1986:239) film merupakan hasil dari budaya dan menjadi alat untuk mengekspresikan kesenian. Film adalah salah satu bentuk komunikasi media massa yang terbentuk dari gabungan berbagai teknologi seperti fotografi dan rekaman suara atau yang biasa kita sebut sebagai audio visual, Film juga terbentuk dari berbagai macam kesenian baik seni rupa, seni teater, seni sastra, seni arsitektur serta seni musik dirangkum menjadi satu bentuk yaitu film.

Dalam kaitannya film dapat juga menjadi sebuah media untuk menyampaikan kritik. Salah satu teori tentang film sebagai media kritik adalah teori kritis budaya (*cultural studies*), yang menganggap bahwa film sebagai produk budaya dapat merefleksikan dan mempengaruhi pola pikir masyarakat serta menjadikan isu-isu sosial dan politik sebagai bahan kritik. Menurut teori ini, film bukanlah semata-mata hiburan, melainkan merupakan alat komunikasi dan media kritik yang dapat membentuk dan mengubah pandangan dunia seseorang terhadap masalah sosial dan politik.

Teori kritis budaya diungkapkan oleh sejumlah tokoh, antara lain Stuart Hall dan David Bordwell. Stuart Hall, dalam bukunya "*Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*", mengatakan bahwa media massa, termasuk film, merupakan produk budaya yang diciptakan oleh kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi tertentu. Oleh karena itu, film dapat digunakan sebagai media kritik yang mampu membongkar dominasi kekuatan-kekuatan tersebut dan memberikan suara bagi golongan yang kurang terwakili di dalam masyarakat.

Politik Uang

Menurut Aspinall & Sukmajati (2015), politik uang adalah usaha untuk menyuap pemilih dengan memberikan uang atau layanan tertentu untuk mempengaruhi preferensi suara pemilih agar diberikan kepada pihak yang menyuap.

Perilaku politik uang dapat menghasilkan fenomena klientelisme dan patronase. Klientelisme merupakan bentuk pertukaran yang bersifat personal dan ditandai dengan adanya kewajiban serta hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara kedua pihak. Fenomena ini juga ditandai dengan aktivitas para patron yang menyiapkan akses bagi kliennya, seperti sarana-sarana tertentu. Oleh karena itu, terbentuklah pola hubungan yang saling menguntungkan dalam pertukaran timbal balik antara kedua pihak (Aspinall & Berenschot, 2019; Aspinall & Hicken, 2019). Tetap dalam Aspinall (2019) menyatakan bahwa patronase merupakan pembagian keuntungan antara politisi dan individu tertentu, seperti pemilih, para pekerja, atau pegiat kampanye, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan politik dari mereka.

Ahmad (dalam Satriawan, 2019) menyebutkan bahwa bentuk-bentuk politik uang dapat dibagi sebagai berikut:

- a) Berbentuk uang (*cash money*). Seseorang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi atau kelompoknya pada pihak lain dengan berbagai sarana, termasuk uang.
- b) Berbentuk fasilitas umum. Salah satu alat yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat adalah dengan memberikan fasilitas seperti semen, pasir, besi, batu dan sejenisnya. Fasilitas dan sarana umum yang umumnya digunakan dalam politik ini meliputi pembangunan masjid, *mushalla*, madrasah, jalan-jalan kecil, dan sebagainya.

Dedi Irawan (dalam Satriawan, 2019) mengatakan bahwa terdapat beberapa strategi-strategi politik uang yang dibagi sebagai berikut:

- a) Serangan Fajar. Serangan Fajar bertujuan untuk membeli suara dan biasanya ditargetkan pada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Praktik ini sering terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.
- b) Mobilisasi Massa. Mobilisasi massa merujuk pada kegiatan kampanye yang melibatkan pengumpulan massa dengan menawarkan sejumlah uang sebagai insentif untuk ikut serta dalam kampanye yang diselenggarakan oleh partai politik.

Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa

Politik uang dalam Pilkades dapat dijelaskan dengan konsep kecurangan dalam pemilihan yang melibatkan penyuaipan atau pemberian hadiah dalam bentuk uang atau barang lainnya kepada pemilih, guna mempengaruhi mereka untuk memilih calon tertentu.

Ketergantungan pemilih terhadap calon kepala desa juga menjadi faktor yang memperparah praktik politik uang dalam Pilkades. Sebagian besar pemilih di desa masih bergantung pada pemberian bantuan sosial atau dana desa yang dikelola oleh kepala desa, sehingga mereka rentan terhadap penyuaipan atau pemberian hadiah. Dalam buku "Kontestasi Demokrasi Desa" karya Kuskridho Ambardi dan Ruly Arief Rochman (2018), disebutkan bahwa politik uang pada Pilkades dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan mengancam keberlangsungan pembangunan di desa. Praktik ini dapat membuat kepala desa terpilih menjadi lebih memilih untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, daripada memenuhi kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat desa.

Semiotika John Fiske

Semiotika adalah studi yang berkaitan dengan interpretasi suatu sistem tanda, ilmu yang terfokus pada media, atau analisis tentang bagaimana tanda-tanda dalam sebuah karya berkomunikasi makna dalam masyarakat. John Fiske menjelaskan teori yang terkait dengan kode-kode televisi atau yang dikenal sebagai "kode-kode televisi." Kode-kode ini yang muncul atau digunakan dalam konteks

televisi memiliki hubungan yang kompleks yang membentuk makna tertentu. Penting untuk dicatat bahwa realitas tidak ditampilkan dengan langsung melalui kode-kode ini. Sebaliknya, setiap kode diproses melalui persepsi individu manusia sesuai dengan latar belakang dan pengalaman mereka, sehingga pemahaman terhadap kode tersebut akan berbeda-beda untuk setiap orang (Vera, 2015: 33).

John Fiske menguraikan pemahaman terhadap kode-kode tersebut menjadi tiga tingkat, yaitu level realitas, level representasi, dan level ideologi. Seiring dengan perkembangan, model semiotika John Fiske tidak hanya digunakan untuk menganalisis program televisi, melainkan juga dapat diterapkan dalam menganalisis konten media lain seperti film, video klip, iklan, dan sejenisnya.

1. **Level Realitas:** Pada tingkat ini, suatu pesan atau kode disusun sesuai dengan realitas yang tercermin dalam budaya yang ada. Ini melibatkan penggambaran peristiwa yang diwakili sebagai suatu bentuk realitas. Kode sosial yang terlibat mencakup penampilan, kostum, riasan, lingkungan, perilaku, gerakan tubuh, dan ekspresi.
2. **Level Representasi:** Tingkat representasi melibatkan proses di mana realitas tertentu dijelaskan dengan menggunakan alat teknis dalam produksi, seperti kamera, pencahayaan, musik, dan suara. Elemen-elemen ini diindikasikan secara teknis dengan memanfaatkan kode-kode seperti pengaturan kamera, pengaturan pencahayaan, serta elemen-elemen suara. Selanjutnya, realitas ini ditransformasikan menjadi narasi, konflik cerita, latar belakang, dan elemen lainnya.
3. **Level Ideologi:** Pada tingkat ini, pesan atau kode yang ada mencerminkan realitas berdasarkan budaya yang mengikatnya. Ini juga mencakup penggambaran peristiwa yang dikodekan sebagai bentuk realitas. Kode sosial yang termasuk di dalamnya mencakup penampilan, kostum, riasan, lingkungan, perilaku, gerakan tubuh, dan ekspresi. Tingkat ini mempertimbangkan pengaruh ideologi dan nilai-nilai sosial yang mungkin ada dalam pesan atau kode tersebut.

Dengan pendekatan ini, model semiotika John Fiske memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis cara pesan atau kode dalam media menciptakan, menggambarkan, dan menyampaikan makna melalui berbagai elemen teknis dan sosial.

Kapitalisme

Kapitalisme berasal dari kata "kapital," yang merujuk kepada modal. Dalam konteks ini, modal mengacu pada alat produksi, seperti tanah dan uang. Oleh karena itu, kapitalisme dapat diartikan sebagai ideologi yang menempatkan kekuasaan pada tangan mereka yang memiliki modal atau alat produksi. Menurut Adam Smith dalam (Hasan & Mahyudi, 2020) ia mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang ditandai oleh kepemilikan perorangan terhadap alat produksi, distribusi, dan penggunaannya dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam lingkungan persaingan.

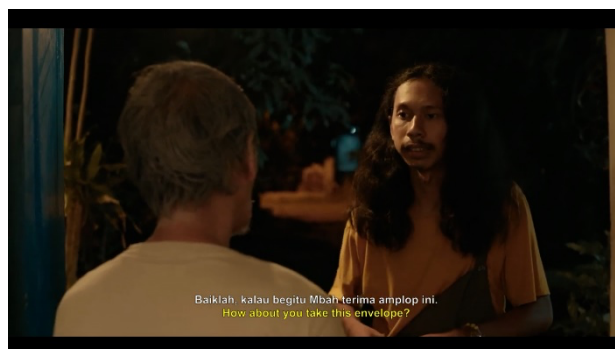
Kapitalisme dan politik uang adalah dua konsep yang sering kali terkait erat dalam sistem politik yang mengadopsi ideologi kapitalisme. Kapitalisme politik mengacu pada hubungan yang kuat antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi, di mana perusahaan dan individu kaya memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan kebijakan politik. Politik uang, di sisi lain, adalah praktik di mana uang atau kekayaan digunakan untuk memengaruhi proses politik, seperti pemilihan umum atau pengambilan kebijakan, dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau politik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sering kali digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menerapkan metode analisis semiotika John Fiske. Terdapat tiga elemen kunci dalam semiotika John Fiske yang digunakan untuk mengkaji dan membedah suatu fenomena dalam film, yakni level realitas, level representasi, dan level ideologi. Dalam penerapannya, metode semiotika mengharuskan pengamatan yang komprehensif terhadap seluruh konten teks, termasuk juga cara presentasi dan terminologi yang digunakan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang mengikuti empat tahapan sebagaimana diuraikan oleh Miles dan Huberman dalam karya Burhan Bungin (2007), yang mencakup pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari temuan yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dengan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap level realitas, representasi dan ideologi dari model analisis semiotika John Fiske, melalui analisis terhadap ketiga level tersebut bahwa film '*Lansia Lan Sopo*' mengandung beberapa *scene* paling menonjol yang merujuk pada tindakan politik uang dalam kampanye pemilihan kepala desa. Selain menguraikan hasil penelitian maka peneliti juga membahas hasil dari temuan tersebut, guna mendukung hasil penelitian ini peneliti didukung dengan adanya data sekunder berupa studi kepustakaan yang berupa buku, artikel ataupun jurnal ilmiah yang berbentuk cetak dan digital.



Gambar 1. Scene 2

Sumber: Lampiran, film '*Lansia Lan Sopo*'

Pada *scene* 2 ini menampilkan Mamat yang mendatangi rumah Mbah Kusno di waktu subuh. Di *scene* tersebut diperlihatkan bahwa Mamat berniat untuk memberikan sekarung beras dan juga sebuah amplop berisikan uang untuk Mbah Kusno. Namun disitu Mbah Kusno menolak dengan memberitahukan bahwa beras mereka masih banyak dan untuk amplop berisikan uang bisa dimasukkan ke kotak amal masjid saja. Selain itu juga diperlihatkan Budi yang sedang di atas pohon mencari Jamal ayam jagonya yang hilang.

Aspinall & Sukmajati (2015) mengatakan bahwa politik uang adalah usaha untuk menyuap pemilih dengan memberikan uang atau layanan tertentu untuk mempengaruhi preferensi suara pemilih agar diberikan kepada pihak yang menyuap. Dalam *scene* 2 ini, politik uang yang berusaha ditampilkan melalui level realitas diwakilkan dengan tanda perilaku, percakapan dan *gesture*. Terlihat pada *scene* 1 ini Mamat yang berperilaku persuasif terhadap Mbah Kusno yang berusaha menawarkan beras dan amplop. Secara *gesture* dan percakapan di awal Mamat terlihat hanya ingin memberikan kedua hal itu secara cuma-cuma, namun setelah ditolak berkali-kali oleh Mbah Kusno di akhir *scene* pun ia berkata "*Ojok lali yo, coblos sing onok gambare juragan pari.*" perkataan tersebut menunjukkan tujuan asli dari pemberian Mamat tersebut.

Secara level representasi *scene* 2 juga dipertegas dengan teknik pencahayaannya yang menerangkan latar waktu. Pencahayaan pada *scene* 2 dibuat seakan-akan latar waktu tersebut adalah subuh pada saat Mamat mendatangi rumah Mbah Kusno. Teknik yang digunakan adalah *low-key lighting*. Menurut Dedi Irawan dalam (Satriawan, 2019) salah satu bentuk politik uang adalah serangan fajar. Serangan fajar adalah bentuk modus operandi yang dilakukan oleh instrumen politik untuk membeli suara dari rakyat, hal ini biasa dilakukan saat pagi buta ataupun pagi menjelang pemilihan berlangsung.



Gambar 2. Scene 4

Sumber: Lampiran, film '*Lansia Lan Sopo*'

Dalam *scene* 4 diperlihatkan bahwa Mamat sedang berada di *basecamp*-nya yaitu tempat pengolah padi. Di sana terlihat Mamat duduk di atas sebuah karung sambal berbincang melalu *handphone* terhadap atasannya menceritakan bahwa ia berjanji untuk bisa mendapatkan suara Mbah Kusno. Selama itu juga atasannya terus melakukan *pressing* terhadap Mamat dan juga ia mengingatkan Mamat tentang keinginannya untuk menaikkan haji ibunya.

Perilaku politik uang menimbulkan fenomena klientelisme dan patronase. Fenomena ini juga ditandai dengan aktivitas para patron yang menyiapkan akses bagi kliennya, seperti sarana-sarana tertentu. Oleh karena itu, terbentuklah pola hubungan yang saling menguntungkan dalam pertukaran timbal balik antara kedua pihak (Aspinall & Berenschot, 2019; Aspinall & Hicken, 2019).

Dari *scene* tersebut tergambar jelas secara level realitas bahwa Mamat adalah patron yang menyediakan akses untuk klien (calon kepala desa) mereka. Aspinall (2019) menyatakan bahwa patronase merupakan pembagian keuntungan antara politisi dan individu tertentu, seperti pemilih, para pekerja, atau pegiat kampanye, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan politik dari mereka. Sesuai yang digambarkan pada *scene* tersebut Mamat sangat bersikeras bisa memenangkan juragannya karena adanya pembagian keuntungan antara politisi bersangkutan (klien) dan individu tertentu (patron).



Gambar 3. Scene 8

Sumber: Lampiran, film 'Lansia Lan Sopo'

Dalam *scene* 8 ini setelah Aji yang menceritakan kebingungannya kepada teman-temannya mengenai cara mendapatkan suara Mbah Kusno, tiba-tiba terlihat Budi yang celingak-celinguk menggunakan teropong di seberang kolam renang. Teman Aji yang menyadari itu langsung menyeletuk sebuah ide, bagaimana jika tidak bisa mendapatkan hati kakeknya mungkin bisa melalui cucunya. Mendengar hal tersebut Aji langsung setuju dan spontan berdiri untuk mengejar Budi.

Kapitalisme dan politik uang sangat erat kaitannya. Pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa adalah lahan yang subur untuk kapitalisme. Menurut Marx dalam (Hasan & Mahyudi, 2020) kapitalisme adalah rezim dimana alat produksi dan sentra ekonomi telah menjadi monopoli kelas sosial pemilik modal. Masih menurut Marx dalam (Hasan & Mahyudi, 2020) kapitalisme dilahirkan dari persaingan bebas dan tidak dapat dipahami tanpa persaingan bebas, dengan satu ciri khusus bahwa dia mengubah tenaga kerja menjadi komoditi.

Scene tersebut sangat menunjukkan bagaimana tim sukses dari kedua kubu yang berperan sebagai pemilik modal memanfaatkannya sebagai komoditas untuk mendapat keuntungan yang mereka inginkan.



Gambar 4. Scene 10

Sumber: Lampiran, film '*Lansia Lan Sopo*'

Dalam *scene* ini memperlihatkan Budi sebagai objek utama dan sedang melihat sekitar dengan teropongnya mencari Jamal ayam jagonya. Lalu terlihat dari jauh ada 2 orang pria berlari ke arahnya, yang tidak lain adalah Mamat dan Aji. Saat sudah dengan Budi, Mamat dan Aji terus saling balas membalas bahwa mereka lah yang akan membantu menemukan Jamal. Karena hal tersebut Budi pun memarahi mereka dan apabila ingin membantu mereka tidak boleh berisik.

Dalam buku "Kontestasi Demokrasi Desa" karya Kuskridho Ambardi dan Ruly Arief Rochman (2018), disebutkan bahwa politik uang pada Pilkades dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan mengancam keberlangsungan pembangunan di desa. Ditegaskan juga (Pratama Dwi *et al*, 2017) politik uang pada Pilkades dapat memperlemah partisipasi politik masyarakat desa dan mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Secara pesan *scene* 10 tersebut berusaha menampilkan bahwa kepentingan pribadi Aji dan Mamat sebagai salah satu tangan kanan dari pemilik modal dalam politik uang membuat mereka tidak akur dan tidak peduli terhadap sekitarnya yang dapat memicu konflik sosial hanya untuk mendapatkan kepentingan mereka masing-masing.

Pada level representasi, berbagai metode pengambilan gambar digunakan dalam film ini untuk menggambarkan bagaimana tindakan politik uang di dalamnya direpresentasikan. Salah satu cara yang digunakan adalah untuk memperkuat gerakan dan ekspresi pada setiap karakter, sehingga pengambilan gambar menggunakan *medium close up* dan *close up*, yang berarti kamera mengambil gambar dari kepala hingga dada atas karakter. Selain itu, penggunaan pengambilan gambar pada *eye level* digunakan untuk membuat penonton merasa terlibat dalam percakapan yang ada dalam film *Lansia Lan Sopo*. Terdapat juga pengambilan gambar *full shot* yang digunakan untuk menciptakan atmosfer dalam setiap adegan.

Dalam hal pengaturan pencahayaan, sebagian besar dari film ini mengandalkan teknik *natural-lighting*, yang bertujuan untuk menciptakan pencahayaan yang mirip dengan kondisi sehari-hari. Namun, ada juga beberapa adegan yang menggunakan teknik *low-key lighting* untuk menekankan dramatisasi dalam adegan.

Film '*Lansia Lan Sopo*' ini memiliki level ideologi yang mana menampilkan perilaku atau tindakan politik uang dalam sebuah desa selama masa pemilihan calon kepala desa. Terfokus pada bagaimana Aji dan Mamat berusaha untuk melakukan *vote buying* dari seorang warga desa bernama Mbah Kusno. Aji dan Mamat menempatkan diri mereka sebagai patron untuk klien mereka yang merupakan juragan mereka masing-masing. Hubungan tersebut membuat mereka memiliki modal untuk saling bersaing satu sama lain. Komoditas modal yang mereka gunakan berupa uang, hasil bumi (padi dan ikan), dan jasa mereka.

Dalam hal ini Aji dan Mamat mendasarkan kapitalisme dalam kegiatan politik mereka, dimana Aji dan Mamat sebagai tangan kanan dari pemilik modal atau alat produksi memanfaatkan hal tersebut untuk membeli produk 'suara rakyat' yang digunakan untuk mencapai keuntungan dari kliennya (juragan) yang berupa 'kekuasaan'.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, temuan, dan pembahasan data yang telah dipaparkan film *Lansia Lan Sopo* dinilai dapat merepresentasikan tindakan politik uang selama pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hal tersebut dapat dilihat dari level realitas setiap *scene* yang menampilkan perilaku, percakapan dan ekspresi dari kedua tim sukses yang berusaha mendapatkan suara dari warga desa dengan cara memberikan imbalan tertentu. Penggambaran tersebut juga dilengkapi dengan level representasi yang mempertegas secara teknis dari audio visual film tersebut.

Terakhir adalah level ideologi, pada level ini peneliti menggunakan konsep ideologi kapitalisme. Kebebasan politik dalam demokrasi menjadikannya pasangan ideal untuk kapitalisme. Hal ini kerap dijadikan celah untuk kaum kapitalis yang membuat mereka mendominasi kekuatan dan akses politik dengan segala modal yang mereka miliki. Sehingga Penggambaran politik uang pada film ini dominan negatif. Dikarenakan dapat merugikan dan memicu konflik dalam sebuah lingkungan terutama dalam film *Lansia Lan Sopo* adalah pedesaan.

SARAN

Peneliti berharap bahwa penelitian bermanfaat untuk khalayak umum guna memahami lebih jelas bahwa film adalah konstruksi realitas yang juga bisa menjadi sebuah bahan referensi atau evaluasi terkait tindakan politik uang yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Selain itu, peneliti juga berharap untuk penelitian ini dapat memberi masukan mengenai proses pemaknaan serta menambah wawasan analisis semiotika yang digambarkan dalam media film menjadi sebuah objek penelitian yang dapat gali berawal dari latar belakang lalu konstruksi realitas seperti apa yang hendak dibangun dan disampaikan pada khalayak hingga pada pembahasan yang menghasilkan penggambaran melalui tanda verbal dan non verbal yang telah diteliti menggunakan analisis semiotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, K., & Rochman, R. A. (2018). *Kontestasi Demokrasi Desa*. Penerbit Kepik.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Aspinall, E., & Hicken, A. (2019). *Guns for Hire and Enduring Machines: Clientelism Beyond Parties in Indonesia and the Philippines*. *Journal Democratization* 27(1): 137- 156.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelism pada Pemilu Legislatif 2014*.
- Bungin, B. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok : PT Raja Grafindo. Danim
- Cahyanto, I., & Pratama, D. (2017). *Money politics in the Indonesian Local Election*. *Journal of Political Science*, 1(1), 21-31.
- Effendy, O. U. (1986). *Dimensi Dimensi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage Publications.
- Hasan, Z., & Mahyudi, M. (2020). Analisis terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(1), 24-34
- Manah, F. H. (2021, Juni 25). *Politik Uang dan Solusinya dalam Hukum*. Diunduh dari <https://rumahpemilu.org/politik-uang-dan-solusinya-dalam-hukum/>
- Puspitasari, F. (2013). *Representasi Stereotipe Perempuan dalam Film Brave*. *Jurnal E-Komunikasi*, 1(2)
- Ramadani. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal Di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Di Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area
- Satriawan, M. (2019). *Praktek Politik Uang Dalam Kontestasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019*. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram

Sobur, A. (2003). *Semiotika Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya.

Trianton, T. (2013). *Film Sebagai Media Belajar*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Vera, N. (2015). *Semiotika dalam Riset Komunikasi*. Bogor: Ghalia. Indonesia